

POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA

¹Nur Lailatul Aidah, ²Sindy Rochmadian, ³Usna Maliha

¹²³UIN Sunan Ampel Surabaya

¹05020221077@student.uinsby.ac.id

²05020221085@student.uinsby.ac.id

³05020221088@student.uinsby.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
Politik Identitas, Pemilu, Demokrasi	Penelitian ini membahas mengenai munculnya politik identitas pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dimana kemunculan politik identitas ini disebabkan adanya perbedaan agama, suku, adat dan lainnya yang dimana salah satu kelompok-kelompok tertentu merasa di intimidasi dan di diskriminasi oleh para pihak-pihak yang lain, sehingga menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat Indonesia yaitu salah satunya rengangnya persaudaraan antar negara dikarenakan adanya perbedaan dari satu sama yang lain, sehingga membuat demokrasi di negara Indonesia ini tidak bekerja dengan baik atau bahkan tidak berguna sama sekali. Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki suku, pulau, atau bahkan adat sehingga membuat Indonesia berbeda dari negara-negara yang lain yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat, akan tetapi menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya resiko terpecah belahnya masyarakat Indonesia dikarenakan timbulnya politik identitas ini, sehingga ketika terjadi pemilu masyarakat yang memiliki kesempatan untuk memilih lebih banyak melakukan golput karena merasa bakal calon yang dipilih tidak memiliki kesamaan identitas entah mulai dari suku, adat, atau bahkan agama. Saat ini politik identitas semakin menjadi karena tidak adanya tindakan yang dapat menyadarkan masyarakat mengenai politik identitas ini, sehingga banyak masyarakat yang menganggap sepele kejadian tersebut atau

	<i>bahkan mereka tidak sadar sama sekali mengenai politik identitas.</i>
Keywords	Abstract
<i>Identity Politics, Election, Democracy</i>	<i>This research discusses the emergence of identity politics in the holding of elections in Indonesia, where the emergence of identity politics is due to differences in religion, ethnicity, customs and others where certain groups feel intimidated and discriminated against by parties who other, giving rise to many problems for the people of Indonesia, one of which is the lack of brotherhood between countries due to differences from one another, thus making democracy in Indonesia not work properly or even useless at all. Indonesia is a country that has many tribes, islands, or even customs that make Indonesia different from other countries which can be the pride of the people, but is one of the biggest causes of the risk of splitting Indonesian society due to the emergence of this identity politics, so that when there is an election, people who have the opportunity to vote are more likely to abstain because they feel that the candidates chosen do not have the same identity, whether starting from ethnicity, custom, or even religion. At present, identity politics is increasingly becoming because there is no action that can make people aware of this identity politics, so that many people take this incident for granted or are not even aware of this identity politics at all.</i>

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk yang berideologi Pancasila, namun setelah reformasi, kehidupan bangsa Indonesia menghadapi tantangan, antara lain meluasnya politik identitas, yang merepresentasikan identitas kelompok atau simbol tertentu. untuk mendapatkan pengaruh politik. Politik identitas awalnya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an untuk tuntutan minoritas yang terpinggirkan dan untuk perjuangan gender dan ras. Dalam sejarah manusia didorong oleh perjuangan untuk pengakuan. Satu-satunya solusi yang dapat diterima untuk keinginan pengakuan universal adalah agar martabat manusia setiap orang dihormati. Adanya pengakuan universal ditentang oleh bentuk-bentuk pengakuan parsial lainnya berdasarkan bangsa,

agama, sekte, ras, suku, jenis kelamin atau individu yang ingin diakui sebagai superior. Dalam politik praktis, identitas yang jauh dari nilai persatuan dan kesatuan sering dijadikan alat politik dan untuk memenangkan suara dalam pemilu, untuk mendapatkan dukungan massa, dan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan sebagai bagian dari tujuan politik. menyelesaikan Republik Indonesia. Karena pada intinya, politik identitas adalah fenomena politik yang mengedepankan perbedaan identitas. Tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah politik identitas yang mengarah pada disintegrasi bangsa.¹

Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak lepas dari orientasi identitas agama dan etnis. Hal ini terlihat dari partisipasi partai politik yang mengikuti pemilu atau pilkada sebelumnya. Proses demokrasi, khususnya dalam Pilkada seringkali tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam berbagai ideologi yang melemahkannya. Identitas agama dan etnis yang berbeda sering digunakan sebagai instrumen politik.

Politik identitas menggunakan identitas diri, seperti ras atau agama, sebagai basis politik. Misalnya, seorang politikus dari Jawa juga akan meyakinkan orang dari Jawa untuk memilihnya karena kesamaan identitas. Dalam pemilihan presiden, kedua calon berusaha merebut hati pemilih Muslim yang jumlahnya sekitar 160 juta, sekitar 85 persen dari total pemilih. Sebenarnya, politik identitas sering digunakan dalam pemilu sebelumnya, tapi tidak pernah secara konkrit dalam pemilu kali ini. Sejak Pilkada DKI di Jakarta tahun 2017, politik identitas Islam mampu menggerakkan massa. Hal itu dibuktikan dengan kekalahan Basuki Cahaya Purnama dalam pencalonan, meski tingkat persetujuannya saat menjadi Gubernur DKI mencapai 70 persen, meski warga sangat puas dengan pekerjaannya. Ahli menganggap bahwa hal ini dapat mempengaruhi kohesi sosial masyarakat.

Singkatnya, politik identitas tidak bisa dilawan dengan politik identitas yang “lebih lembut”. Kita harus melawan kebijakan yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Selain itu, kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa

¹ I Putu Sastra Wingarta et al., “PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA (The Influence of Identity Politics on Indonesian Democracy),” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 4 (2021): 117–124.

agama tidak didorong ke ranah politik. Agama cukup sebagai pedoman hidup keyakinan dan moralitas baik dalam ranah individu maupun sosial, karena ajaran agama lebih menekankan keimanan, ritual kultus dan moralitas dan etnisitas untuk kepentingan politik, maka terjadilah politisasi agama, yang membuka kemungkinan terjadinya mendatarikannya, terjadi kekerasan kota, dan akibatnya, semangat demokrasi yang diperjuangkan oleh pemerintah rakyat pada tahun 1998 menjadi sia-sia. Di sisi lain, peran tokoh agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu harus secara bersamaan menggiring umatnya untuk jatuh ke dalam perangkap politisasi agama oleh kelompok tertentu untuk memenuhi hasrat politiknnya. kekuatannya

Berdasarkan latar belakang di atas, politik identitas mempertimbangkan model pemilu dalam menghadapi fenomena politik identitas dan alasan ancaman politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia dan bagaimana menghilangkannya ketika prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri harus diikuti. di Indonesia. Karena fenomena tersebut merupakan tantangan hari ini dan perlu dicarikan solusi yang tepat, agar demokrasi Indonesia dapat berjalan sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu dibahas dampak politik Indonesia terhadap demokrasi Indonesia.

Politik Identitas

Politik Identitas merupakan perilaku politis yang berusaha ingin menyumbangkan aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, memimpin terhadap distribusi nilai- nilai yang dianggap berharga sampai akhirnya tuntutan yang paling fundamental, seperti penentuan kemauannya pribadi atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas terinspirasi dengan adanya upaya memasukan nilai-nilai terhadap peraturan daerah, menyendirikan tempat pemerintahan, kemauan menetapkan otonomi khusus hingga dengan terbentuknya gerakan separatis. Sedangkan dalam konteks keimanan atau keyakinan politik identitas terefleksikan dari bermacam upaya supaya memasukan nilai-nilai keagamaan terhadap proses pembentukan kebijakan, termasuk gencarnya perda syariah, maupun usaha membentuk sebuah kota identik dengan agama tertentu.²

² Juhana Nasrudin, "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2019): 34-47.

Bagi kebanyakan masyarakat menganggap politik adalah salah satu organisasi yang dianggap kotor, ketidakadilan, dan menjadi salah satu sebab penindasan bagi salah satu kelompok yang lain. Pemikiran tersebut dapat membangun karakter pada diri setiap masyarakat menjadi tidak peduli dan anti terhadap politik dinegaranya sendiri. Contohnya masyarakat yang tidak ikut andil dalam politik, sering terjadi ketika adanya pemilu, dimana masyarakat melakukan golput dalam pencoblosan pemilu ini, golput ini udah pasti ada dan terjadi dalam pemilu di Indonesia. Perbuatan golput ini dalam bernegara dianggap sebagai perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan yang namanya warga bernegara, sehingga perlu ditangani dengan khusus.³

Pada dasarnya demokrasi di Indonesia itu sendiri berdinamika dengan banyaknya persoalan-persoalan yang beranekaragam, sehingga tidak jarang menjadi penyebab terpecah belahnya antar kelompok. Karena adanya perbedaan keragaman di Indonesia tercatat menjadi salah satu faktor utama terjadinya perpecahan konflik, seperti konflik antar agama, antar etnis, antar suku. Permasalahan tersebut menjadi semakin bersemarak, bukan hanya menjadi permasalahan satu identitas saja tetapi mencakup antar semua identitas. Semarak nya konflik antar identitas ini seringkali bisa di jumpai sebagai Bagian dari proses demokratisasi, yang bisa juga dibilang sebagai “demokrasi liar”.⁴

Permasalahan yang terjadi ini akhirnya menjadi semakin besar dengan adanya kelompok-kelompok yang mengaku sebagai nasionalisme falsafah yang harus diakui oleh masyarakat Indonesia sebagai pondasi untuk saling menghargai dan menerima dengan adanya perbedaan atau bisa disebut sebagai keragaman, yang sudah diakui sejak awal negara ini merdeka. Adapun keragaman yang ada di Indonesia ini antara lain yaitu perbedaan agama, suku, adat istiadat, bahasa, dan masih banyak lagi. Akhirnya nasionalis ini terbentuk menjadi komunitas yang solid dalam menjunjung ketegasan berkaitan arah politik identitasnya. Sebagai pokok dasarnya kata identitas merupakan sesuatu yang kerap kali sering

³ Agus Saputro, “Agama Dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019,” *Asketik* 2, no. 2 (2018): 111–120.

⁴ Yeni Lestari Sri, “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama,” *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 12, <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4>.

kita dengar. Apalagi ini merupakan konsep utama untuk mengetahui suatu hal, kita akan mengetahui atau mengerti sesuatu hal kalau kita sudah mengetahui identitasnya. Politik identitas merupakan kata lain dari nama politik perbedaan dan juga biopolitik.⁵

Menurut materi politik identitas adalah politis yang tujuannya ingin mengedepankan keperluan anggota-anggotanya yang ada disetiap kelompok karena adanya kesamaan identitas atau bahkan kesamaan sifat mulai dari yang dasarnya kepada etnisitas, ras, gender, atau keagamaan. Politik identitas adalah suatu perbedaan sebuah rumusan dan politik identitas juga merupakan sebuah perlakuan politis dengan adanya usaha penyaluran aspirasi untuk mengelabui sebuah kebijakan. Politik identitas nampak karena dari kesadaran seseorang agar bisa mengelaborasi identitas partikular dalam sebuah bentuk hubungan identitas yang primordial etnik dan agama. Nyatanya didalam jalan selanjutnya politik identitas dapat menjadi tiruan dan dipakail oleh seorang kelompok yang kebanyakan untuk memapankan dominasi sebuah kekuasaan.⁶

Dengan adanya politik identitas ini paling tidak akan menimbulkan 4 masalah yaitu yang pertama dapat menjadi bentuk penghianat terhadap pendiri Indonesia yang sudah susah payah dengan menyatukan semua kelompok masyarakat dimana Indonesia berdiri diatas jerih payah semua kelompok bukan hanya dari dari satu atau dua kelompok saja. Kedua, politik identitas memperburuk situasi atau mengancam kohesivitas sosial masyarakat, karena dia akan membuat masyarakat semakin terbelah belah. Ketiga, politik identitas ini akan memperburuk budaya politik di Indonesia, karena politik identitas ini biasanya akan menghasilkan apa yang disebut sebagai intoleransi politik, sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa intoleransi politik di Indonesia memburuk sejak pilkada DKI tahun 2017. Intoleransi di Indonesia memburuk ini di akibatkan karena adanya kelompok masyarakat yang mempolitisir agama memobilisasi massa mengajak orang tidak memilih seorang kandidat hanya karena dia keturunan Tionghoa dan Kristen ini adalah sesuatu yang tidak sehat dan merusak bagi

⁵ Muhammad Habibi, "Identity Politics in Indonesia," *Universitas Mulawarman, Samarinda* 1, no. March (2017): 1–23, <https://www.researchgate.net/publication/315338050>.

⁶ Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, and Usni, "Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2, no. 2 (2021): 1–35, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen>.

bangsa Indonesia dan merusak bagi demokrasi di Indonesia. Keempat, politik identitas itu akan membuat demokrasi kita tidak bekerja, karena pada dasarnya dalam politik atau dalam demokrasi yang sehat, masyarakat atau pemilih, memilih kandidat atau partai politik berdasarkan program apa yang mereka tawarkan kepada masyarakat untuk memecahkan persoalan kita sehari-hari bukan untuk atas dasar sentimen agama, yang membuat mereka tidak bisa berfikir dengan jernih ketika berada di kotak suara.

Sehingga secara keseluruhan teori politik identitas dan setiap hasil penelitian menunjukkan, ada beberapa faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul untuk digunakan dan menjadi cagak dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Muncul adanya keinginan untuk mempertahankan atau menjunjung identitas yang ada dalam suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut dimulai secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menjadikan beberapa kelompok identitas saling beradu dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, ataupun pilkada, merupakan proses politik di mana ada beberapa faktor seperti identitas menjadi pertarungan. Sehingga saat ini tinggal bagaimana aktor-aktor yang masuk di dalamnya menjadikan isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertarungan.

Asas-Asas Pemilu di Indonesia

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.⁷ Berikut penjelasan asas-asas pemilu:

- a. Langsung: Pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung, tanpa perantara, sesuai hati nuraninya. Prinsip ini merujuk pada “demonstrasi” yang langsung memilih wakilnya di parlemen. Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk

⁷ Sun Fatayati, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas,” *Institut Agama Islam Tribaketi Kediri* 28, no. 1 (2017): 147–165.

memilih secara langsung dan menurut hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini belum didelegasikan kepada seseorang atau sekelompok orang. Menjalankan hak langsung secara langsung kepada mereka yang mencari kekuasaan.

- b. Umum (*Algemene, General*): semua warga negara yang memenuhi persyaratan hukum memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasi. Secara umum, semua warga negara yang telah mencapai usia minimum, yaitu yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin, berhak memilih dalam pemilihan anggota parlemen. Yang berhak adalah warga negara yang telah mencapai usia 21 tahun. Oleh karena itu, pemilihan umum pada hakekatnya dimaksudkan untuk menjamin kesempatan bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu, tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, wilayah, dan status sosial. .
- c. Bebas (*Vrije, Independent*): Bebas artinya setiap negara yang memiliki hak pilih berhak memilih tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Setiap warga negara dijamin keamanannya dalam menjalankan haknya. Dalam demokrasi, kebebasan adalah hal yang sangat penting dan prinsip yang paling utama. Pemilihan memungkinkan kekuasaan untuk dipertukarkan secara teratur dan dengan cara yang terkendali. Dengan demikian, semua warga negara mendapatkan kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa campur tangan dan tekanan dari siapapun.
- d. Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*): Kerahasiaan berarti bahwa pemilih dijamin bahwa tidak ada pihak yang mengetahui pilihan mereka. Kerahasiaan ini, sebagaimana telah disebutkan, adalah rantai dari "rasa" kebebasan.
- e. Jujur (*Eerlijk, Honest*): Integritas berarti pemerintah dan partai politik peserta pemilu, penyelenggara dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, bersikap dan bertindak jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan, menyelenggarakan/menyelenggarakan pemilu harus.
- f. Adil (*Rechtvaardig, Fair*): Adil artinya dalam pemilu setiap pemilih dan setiap pihak peserta pemilu diperlakukan sama dan

bebas dari kecurangan partai. Adil memiliki dua arti, yaitu: hanya sikap moral dan hanya karena sistem hukum. Oleh karena itu, pemilu memerlukan sikap adil dari semua pihak, masyarakat, pemilih, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Sikap adil ini bertujuan untuk menjaga kualitas pemilu yang adil yang tidak menguntungkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Gejala Politik Identitas pada Pemilu di Indonesia

Menjelang pemilu yang rencana akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024. Umumnya akan marak politik identitas bermunculan hal ini melihat dari bagaimana pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun-tahun sebelumnya terutama pada pemilihan tahun 2019 kemarin dimana politik identitas sangat marak terjadi hal ini dapat dilihat dari kampanye-kampanye pada pilpres 2019 yang seharusnya menjadi sarana bagi untuk masyarakat untuk tahu mengenai informasi-informasi akan gagasan para pasangan calon presiden dan wakilnya itu malah didominasi dengan kapitalisasi mengenai isu politik identitas dan sara bahkan ujaran kebencian serta saling mengolok politik antar kubu.

Adapun berbagai macam pemberitaan yang pada masa itu (2019) mengandung unsur-unsur identitas politik diantaranya yaitu artikel "*Ma'ruf: saya punya darah madura dan arosbaya*" yang diterbitkan pada 19 oktober 2018 silam, redaksi pada artikel ini sangat menonjolkan maruf amin dengan mengatakan bahwa beliau punya darah arosbaya dan bahkan menambahkan silsilah kelahiran beliau demi memperkuat apa yang dikatakan hal ini mereka lakukan guna mendapatkan dukungan dari warga madura dan simpati tamu yang hadir di acara itu.⁸ Berikutnya terdapat artikel yang berjudul "*Jokowi mencintai Kyai dan Santri*" yang diterbitkan pada 30 oktober 2018 ini berdasarkan dari redaksi sangat mencerminkan politik identitas lewat agama karena dalam hal ini para santri dan kyai merupakan bagian dari agama islam dan bahkan demi memperkuat redaksi tersebut maruf amin mengatakan demi menunjukan rasa cintanya pada para santri dan kyai bapak jokowi sampai menetapkan hari santri

⁸ "Maruf: Saya Punya Darah Madura Dan Arosbaya," accessed June 21, 2023, <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/GNl2Xn2k-ma-ruf-saya-punya-darah-madura-dan-arosbaya>.

nasional yaitu tanggal 22 oktober.⁹ Kemudian berita “*ma’ruf amin yakin raup 70 % suara di banten*” pada berita tersebut dikatakan bahwa bapak ma’ruf amin sangat percaya diri bahwa dirinya akan dipilih masyarakat di banten karena beliau adalah putra banten yang pastinya hal ini diucapkan dengan maksud mendapat simpati masyarakat banten dengan dasar kesamaan suku atau ras yang jelas hal ini mengandung unsur identitas politik didalamnya. Pada dasarnya media seharusnya bukan menjadi sarana bagi oknum politik atasarana bagi siapapun kecuali untuk publik dalam memperoleh kebenaran informasi

Dalam berbagai pemberitaan artikel diatas semuanya ditulis oleh satu web yaitu Medcom.id. Medcom.id merupakan web berita online yang berisikan berita yang bertemakan Parpol, Pemilu, Orasi. Namun banyak sekali berita yang dikeluarkannya menjelang pemilu 2019 ini berisi politik identitas ditemukan lebih dari 5 berita yang menunjukan unsur politik identitasnya dan hal ini membuktikan bahwa Medcom.id melakukan pembingkaian pada unsur politik identitas dan bahkan mendukung secara terang-terangan pernyataan para pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu bapak jokowi dodo dan ma’ruf amin beserta para pendukung-pendukungnya yang berunsur politik identitas tersebut dengan memberi tambahan fakta lapangan atas pernyataan-pernyataan para pasangan calon ini disetiap artikelnya dan lebih banyak ditonjolkan dari segi agama dan suku yang hal ini dilakukan agar masyarakat bersimpati kepada calon-calon yang didukung oleh Medcom.id ini.

Lalu bagaimana dengan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden mendatang besok? Apakah sudah muncul gejala identitas politiknya? Oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) mengungkapkan mulai mencium adanya gejala identitas politik ini yang diungkapkan pada FGD Seminar Nasional Lemhanas RI Tentang Tantangan Pemilu 2024 : Mereduksi Politik Identitas pada kamis bulan april tanggal 30 tahun 2022 kemarin. Bahkan sudah terlihat adanya individu atau politikus yang ceroboh atau sengaja ketika berkomunikasi menyinggung psikologi massa dan faktor media (media sosial).

⁹ medcom id developer, “Jokowi Mencintai Kiai dan Santri,” *medcom.id*, last modified October 30, 2018, accessed June 21, 2023, <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/VNxq6qgb-jokowi-mencintai-kiai-dan-santri>.

Sekalipun anggaran untuk pemilu menjelang tahun depan masih belum disahkan namun suhu politik sudah mulai memanaskan. Para partai politik sudah mulai mencari kandidat untuk calon pasangan pilpres nanti dan makin agresif meningkatkan keterpilihan kriteria pilihan para partai politik ini. Salah satu sarana yang paling murah dan mudah adalah politik identitas. Di daerah sukabumi telah dilakukan penelitian bahwa terdapat politik identitas kiai yang cenderung pada identitas keagamaan yang didapatkan berdasarkan survei kepada masyarakat sukabumi dan hasilnya adalah mereka cenderung memilih pemimpin berdasarkan identitas agama atau kesamaan agama, yaitu agama islam. Pernyataan ini semakin dikuatkan dengan jawaban wawancara dari abah fatah selaku pimpinan pesantren tegal kota sukabumi ini menyatakan bahwasanya bahwa menurutnya tentu harus yang sama agamanya yaitu agama islam dengan alasan bahwa pemimpin seiman akan membawa kepada kebaikan didunia dan diakhirat.¹⁰

Masyarakat sukabumi tidak menyadari bahwa ungkapan-ungkapan kiai untuk menyuruh memilih calon tertentu menurut kesamaan agamanya adalah termasuk dalam politik identitas yang mana politik identitas merupakan cara berpikir serta perjuangan hak orrang yang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tertentu didalam politik untuk mendapat apa yang dimau. Sehingga akan tergirinng opini atau simpati masyarakat sukabumi ini untuk memilih calon pemimpin dengan mengutamakan kesamaan agama dan bukan malah memandang kredibilitas pemimpin tersebut yang hal ini akan membawa dampak yang sangat buruk tentunya dan bahkan akan dapat menjadi strategi untuk dapat terpilih lewat jalur agama.¹¹

Karena di indonesia ini mayoritas masyarakatnya beragama islam tentu saja anggapan pernyataan diatas telah tersebar keseluruh indonesia *"bahwa pemimpin harus beragama islam"* sebenarnya hal ini adala termasuk politik identitas yang sudah cukup umum dikalangan masyarakat karena melihat mayoritasnya adalah umat muslim dan tentu ungkapan ini disebarkan oleh para kyai karena memang

¹⁰ Ratna Istianah and Saehudin, "POLITIK IDENTITAS DAN PERILAKU POLITIK KIAI DI KOTA SUKABUMI MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (May 20, 2023): 233–250, accessed June 21, 2023, //journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/876.

¹¹ Istianah and Saehudin, "POLITIK IDENTITAS DAN PERILAKU POLITIK KIAI DI KOTA SUKABUMI MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024."

diagama islam diajarkan demikian.bahkan terdapat ketentuan khusus bahwa presiden dan wakilnya harus beragama islam karena hal tersebut mendukung suara mayoritas. Sehingga hal demikian selalu digunakan oleh para oknum politisi demi meningkatkan eksabilitasnya dengan membawa bawa nama islam, kyai, santri dan sebagainya yang berunsur keagamaan.

Oeh partai Ummat bahkan dengan terang-terangan menyatakan bahwa pemimpinnya adalah Amien Rais mereka menyatakan pilihannya dengan membawa identitas keagamaan pada pemilu 2024 karena menurut mereka dunia politik tidaklah dapat dipisahkan dengan agama. Disini mereka memang terang-terangan mengungkapkan akan menggunakan politik identitas dalam pemilu 2024 mendatang.¹²

Politik identitas yang didasari atas persamaan identitas ini telah menyebabkan konflik politik terutama di dalam masyarakat yang malah memunculkan ketegangan antara kelompok-kelompok minoritas dengan mayoritas terutama yang berunsur agama. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama muslim dan mayoritas agama ini menjadi suatu ancaman bagi demokrasi liberal yang sangat menjunjung Pancasila terutama untuk agama minoritas. Sehingga pada akhirnya dapat memunculkan berbagai konflik dimasa mendatang.

Mengingat kembali pada masa pemilihan Gubernur di daerah khusus ibukota Jakarta pada 2017 silam bagaimana terjadinya pertarungan politik di antara para calonnya dengan berbagai cara salah satunya adalah politik identitas yang hingga saat ini menjadi dasar pada permasalahan pada sistem demokrasi yang saat ini sedang ditata bersama. Bahkan hingga pemilu berikutnya yaitu pada 2019 masihlah diwarnai oleh politik identitas dan isu-isu yang berunsur Sara baik itu di antara non pribumi serta pribumi dan agama minoritas dengan agama mayoritas serta Pancasila dengan khilafah Islam dibahas oleh forum-forum media pengendali bahwa itu adalah demokrasi. Bahkan ideologi Pancasila telah menjadi salah satu usaha untuk mendapatkan simpati pemilihan masyarakat kepada oknum-oknum politik. Padahal masih banyak isu-isu yang seharusnya dibahas dan menjadi tema utama demi meningkatkan

¹² "Pilpres 2024: Mengapa Partai Ummat gaungkan 'politik identitas' dan kenapa pilihan itu dianggap 'berbahaya?," *BBC News Indonesia*, last modified February 22, 2023, accessed June 21, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14nxqz57jqo>.

keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat yang masih belum terlaksana dengan tuntas.

Tidak hanya isu Saras saja yang diluncurkan pada pasca pemilu Perpres pada tahun 2019 silam namun juga diwarnai oleh politik identitas dengan pernyataan Jokowi bahwa beliau sudah mendapat persetujuan dari seluruh jajaran elemen masyarakat hal itu partai ataupun para ulama beserta relawannya dan beliau juga memberi pernyataan mengenai mengapa memilih Ma'ruf amin sebagai wakilnya atau sebagai pasangannya Hal ini dikarenakan Ma'ruf Amin dianggap sebagai sosok yang agamawan yang bijaksana dan memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, pernyataan-pernyataan Jokowi yang membahas mengenai agama demi mendapat simpati oleh masyarakat agar dapat dipilih bisa dilihat sebagai salah satu bentuk politik identitas guna juga sebagai senjata untuk melawan lawannya. Dan benar saja setelah pernyataan tersebut diungkapkan oleh Jokowi beliau mendapat banyak sekali pendukung selain dari agama minoritas yaitu agama mayoritas (islam)..¹³

Keterlibatan pengikut dan keterlibatan berada dalam kategori rendah artinya secara umum keterlibatan politik di media sosial pada Generasi Z nampak belum sepenuhnya diekspresikan secara terbuka, dan tidak dengan terang-terangan menjadi pengikut suatu pergerakan tertentu di media sosial. Selain itu, nilai rata-rata keterlibatan kontra yang juga rendah mengindikasikan mereka tidak menunjukkan perilaku kontra di media sosial secara terbuka. Namun, dari beberapa responden penelitian ini juga diketahui menunjukkan keterlibatan kontra yang tinggi. Politik identitas dalam kategori sedang berarti bahwa terdapat beberapa responden yang menunjukkan nilai yang tinggi saat merespon pertanyaan seputar kecenderungan memilih wakilnya sesuai dengan persamaan identitas (suku, agama, kedaerahan, dan gender). Sementara itu, nilai keterlibatan laten yang sedang mengindikasikan bahwa ada beberapa responden yang membaca posting, artikel berita atau jenis informasi lain (misalnya opini) dan komentar mengenai pemilu. Mereka juga mungkin menonton video yang terkait dengan pemilu dan mengunjungi halaman atau profil politisi atau tokoh masyarakat dalam konteks pemilu.

¹³ Muhamad Nurul Firdaus and Lusi Andriyani, "Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2, no. 2 (2021): 46–50.

Generasi Z sebagian besar dari mereka merupakan pemilih pemula. Kategori pemilih yang mungkin mempunyai pandangan berbeda dalam politik dari generasi sebelumnya. Jumlah mereka yang besar merupakan target yang cukup potensial dalam meraup suara dan mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Generasi Z merupakan generasi yang sudah melek akan teknologi informasi, internet maupun media sosial. Hal itu cukup memudahkan mereka dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum. Informasi tentang pemilu sendiri tersedia beragam di dunia maya. Ada beragam informasi yang dapat membantu menambah pengetahuan tentang politik, namun ada pula informasi yang dibuat untuk tujuan tertentu untuk menguntungkan suatu pihak.¹⁴

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemaknaan politik dan pendidikan politik melahirkan berbagai permasalahan serta perbedaannya tersendiri terutama ketika dilaksanakannya pemilu, para masyarakat yang masih minim pendidikan politik memiliki pemikiran-pemikiran bahwa partai politik ini fungsinya apa dan apa manfaatnya dalam negara apalagi untuk kesejahteraan mereka sendiri yang mana hal ini juga timbul dari kehadiran partai politik yang mana tidak pernah atau jarang menyelesaikan masalah nyata mereka sehingga di sini masyarakat tidak tahu fungsi adanya partai politik ini sehingga kesadaran mereka dan keterbukaan mereka akan politik tidak akan dapat terbentuk. Maka partai politik di sini seharusnya menyelesaikan masalah nyata mereka secara terbuka sehingga dapat dilihat oleh masyarakat dan membawa kesadaran serta keterbukaan masyarakat untuk partai politik itu.¹⁵

Implikasi Politik Identitas terhadap Demokrasi Indonesia

Politik identitas cenderung lebih ke permasalahan ideologi, agama hingga kepentingan orang Indonesia sendiri. Bisa jadi adanya politik identitas ini menjadikan beberapa konflik yang hampir mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri. Sudah sepatutnya bangsa Indonesia menguatkan kekuatan

¹⁴ Harun Harsono, "Politik Identitas Dan Partisipasi Politik Di Media Sosial: Analisis Model Struktural Pada Generasi Z Di Kota Malang," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 166–187.

¹⁵ Elsa Kristina et al., "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 424–434.

demokrasi yang kokoh sehingga tidak mudah dalam menggoyahkan ideologi pancasila saat ini.¹⁶

Politik identitas yang lebih mengarah kepada proses pilkada maupun pemilu dimana dijadikan bahan persaingan politik yang menjuru pada polulasi keagamaan. Tidak hanya itu, sebagian besar politik identitas mengabaikan moderasi beragama seolah tidak ada jalan tengah dalam mempertimbangkan rasional bangsa Indonesia dan kurangnya dalam berfikir lebih jauh. Sebagian pihak berfikir suatu kesalahan hadir di tengah persoalan masyarakat saat ini. Sehingga yang terjadi kini sikap saling menghujat atau bersaing satu sama lain berada pada masyarakat Indonesia sendiri. Minimnya penerapan demokrasi pada masyarakat membuat suatu kebutuhan politik seharusnya menjadi peringatan yang keras atas luntturnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi di bangsa ini.¹⁷

Lemahnya partai politik di Indonesia saat ini membuat para petinggi politik bergabung dengan aktor politik lokal guna menyebabkan permasalahan politik sebagai bahan keperluan untuk menuju pemilu. Peran partai politik sendiri lemah atas sosok pemimpin di dalamnya yang menghubungkan dengan masyarakat kurang dalam meyakinkan atas identitas tertentu saja. Dengan demikian, hal ini membuat para politisasi identitas merasa diperhatikan atas adanya wadah menuju ke pemilu. Perlunya kehati-hatian karena bisa juga tidak sesuai atas makna dari demokrasi di dalamnya.¹⁸ Demokrasi yang ada di Indonesia saat ini berkembang pesat setelah terjadi intervensi dari pemerintahan meskipun pada dasarnya pemerintah tidak memberikan keadilan terhadap demokrasi yang terjadi. Memang benar masyarakat Indonesia memiliki kebebasan hak dalam demokrasi. Tidak hanya itu banyak sekali keberagaman mulai dari suku, agama, etnis hingga budaya yang ada di Indonesia yang menjadi penguat bisa juga menjadi faktor utama atas perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang kita ketahui timbulnya suatu permasalahan bisa disebabkan dari suatu masalah yang kecil antar individu atau kelompok. Bisa juga kelompok yang memiliki suku, agama, adat

¹⁶ Aldho Faruqi Tutukansa, "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia," *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 14, no. 1 (2022): 20–30.

¹⁷ Ahmad Badwi, "Epistemologi Ushul Fiqh," *Jurnal Hukum Diktum UIN Alauddin Makassar* 10, no. 1 (2012): 197–209.

¹⁸ Frenki, "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 29–48.

istiadat tersebut merasa besar karena kelompok tersebut ada campur tangan atas kemerdekaan atau keberhasilan dari bangsa Indonesia mereka menganggap hanya sebagai toleransi sesama.

Letak demokrasi pada politik identitas di Indonesia sendiri hingga saat ini belum terarahkan seperti yang diharapkan seluruh masyarakat. Adanya permasalahan pemilu ataupun bergantinya pemain elit politik saat ini membuat tetap pada prosedur terhadap pergeseran politik saat demokrasi. Sebenarnya tujuan dari demokrasi masyarakat sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan sosial masih terdapat batasan. Batasan ini yang menjadi kambing hitam atas masalah-masalah yang timbul dari individu maupun kelompok tertentu yang mendiskriminasi atas suatu identitas kelompok tertentu bisa juga saling merendahkan satu sama lain terhadap kelompok yang berbeda atau tidak satu tujuan dengannya.¹⁹

Pengaruh budaya, agama, ataupun adat istiadat dalam sistem politik memiliki kekuatan yang besar. Setiap daerah juga memiliki peran atas birokrasi yang diterapkan dalam demokrasi. Sudah menjadi budaya politik atas birokrasi pada sistem demokrasi karena pengaruh birokrasi tersebut terhadap kebijakan masyarakat Indonesia. Antara budaya politik dan budaya demokrasi memiliki kekuatan atas segala penyebabnya. Pertama, peran penting demokrasi untuk para golongan elit ketika berpolitik. Kedua, birokrasi dijadikan tempat untuk menyuarakan politik. Ketiga, pemerataan pembangunan menjadi tujuan keberhasilan birokrasi daerah setempat. Masyarakat pada daerah tersebut masih meragukan atas tatanan sistem politik karena mereka menganggap lupa akan hal yang sifatnya masih lokal. Contohnya terkait penataan dan penyelesaian terhadap masalah politik yang menjadi panutan tata kelola masyarakat di Indonesia. Timbulnya keraguan dari masyarakat atas kelompok atau golongan politik dimana golongan tersebut masih menjual nilai dari berita lokal dengan tujuan ingin mendapatkan perhatian lebih dari warga lokal. Karena adapula beberapa daerah yang memiliki kekuatan tersendiri untuk terhindar dari gejala politik tersebut. Sehingga bisa diambil dampak apa yang akan diperbuat ketika birokrasi dan sistem politik itu disatukan dalam suatu daerah karena keduanya saling terikat. Lain halnya

¹⁹ Yus Hermansyah, "Politik Identitas Lokal Dalam Proses Demokrasi Indonesia," *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 2 (2022): 139–158.

terhadap masyarakat yang beranggapan bahwa perkembangan politik di daerahnya masih menjunjung nilai kultural yang kental karena akibatnya akan ke cara berpikir elit lokal dalam berupaya merubah pola pikir masyarakat lokal sendiri.²⁰

Politik identitas memiliki peluang yang cukup besar terhadap kesetaraan dan juga ketidakseimbangan dimana proses tersebut menuju demokrasi dalam sebuah negara. Indonesia sendiri membuat politik identitas menjadi terbagi atas kaum yang mendominasi diantaranya masyarakat muslim dan masyarakat nasionalis. Sudah menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat dalam menjaga kestabilan ini, apabila pemerintah tidak ikut andil dalam pengelolaan ini maka bisa jadi akan timbul ketidakseimbangan bagi negara malah hampir menghancurkan negara Indonesia. Sudah bukan menjadi kepentingan permainan politik, akan tetapi bagaimana antara masyarakat, pemerintah dan politis mampu menstabilkan politik identitas ini, sebab adanya suatu perbedaan itulah yang membuat sistem demokrasi tidak bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan untuk menjadi panutan masyarakat.²¹

Peran masyarakat sendiri dalam demokrasi guna mewujudkan pemilihan pemimpin yang akan diselenggarakan para politik, tidak hanya itu masyarakat jug berhak sebagai pengawas atas terpilihnya pemimpin atau kepala negara nantinya. Demokrasi menjadi ajang kompetisi terhadap politik. Meskipun nantinya masyarakat akan diberikan kebebasan dalam berpolitik atau memilih pemimpin negaranya. Karena pemerintah sendiri juga memberikan kebebasan untuk masyarakat dalam berorganisasi, berpendapat, berpolemik maupun berpolitik dengan demikian upaya perwujudan dari kebebasan warna negara dalam demokrasi itu tercapai.

Kesimpulan

Politik indentitas merupakan identitas politik yang dipegang oleh sebagian warga negara bersamaan dengan arah politiknya, biasanya politik identitas tercipta karena adanya kelompok sosial yang merasa diintimidasi, didiskriminasi, oleh dominasi negara dan

²⁰ Widyawati, "Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2, no. 2 (2021): 66.

²¹ Husni Mubarak, "Demokrasi , Politik Identitas , Dan Kohesi Sosial : Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 2 (2018): 365–400.

pemerintah. Dan pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan yang sedang berjalan, sehingga hal tersebut yang membuat lahirnya politik identitas dalam bernegara sehingga menjadi sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya politik identitas merupakan sebuah cara berpolitik yang tercermin pada kesamaan identitas, politik identitas ini tentunya menimbulkan dampak terhadap bangsa dan negara kita, biasanya politik identitas memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan juga pertentangan menuju proses demokrasi sebuah negara. Di Indonesia sendiri dalam hal ini sangat marak digunakannya politik identitas ketika akan diadakannya pemilu, politik identitas jarang tidak digunakan oleh oknum politik karena merupakan strategi untuk mendapatkan suara atau menarik simpati masyarakat hanya dengan modal media sosial yang dapat diakses dengan gratis. Salah satu usaha penanggulangan politik identitas dalam Pemilu 2024 adalah dengan memperkuat kelembagaan partai politik.

Daftar Pustaka

- Ahmad Badwi. “Epistemologi Ushul Fiqh.” *Jurnal Hukum Diktum UIN Alauddin Makassar* 10, no. 1 (2012): 197–209.
- Fatayati, Sun. “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas.” *Institut Agama Islam Tribakti Kediri* 28, no. 1 (2017): 147–165.
- Firdaus, Muhamad Nurul, and Lusi Andriyani. “Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia.” *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2, no. 2 (2021): 46–50.
- Frenki. “Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 29–48.
- Habibi, Muhammad. “Identity Politics in Indonesia.” *Universitas Mulawarman, Samarinda* 1, no. March (2017): 1–23. <https://www.researchgate.net/publication/315338050>.
- Harsono, Harun. “Politik Identitas Dan Partisipasi Politik Di Media Sosial: Analisis Model Struktural Pada Generasi Z Di Kota Malang.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 166–187.

- Hermansyah, Yus. "Politik Identitas Lokal Dalam Proses Demokrasi Indonesia." *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 2 (2022): 139–158.
- Kristina, Elsa, Hutapea Puguh, Santoso Halomoan, Freddy Sitinjak, and Alexandra Achmed. "Tantangan Dan Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 424–434.
- Lestari Sri, Yeni. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama." *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 12.
<https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4>.
- Mubarok, Husni. "Demokrasi , Politik Identitas , Dan Kohesi Sosial : Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia." *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 2 (2018): 365–400.
- Nasrudin, Juhana. "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2019): 34–47.
- Saputro, Agus. "Agama Dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019." *Asketik* 2, no. 2 (2018): 111–120.
- Surya, Dian Ariyani, Ali Noerzaman, and Usni. "Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2, no. 2 (2021): 1–35.
<http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen>.
- Tutukansa, Aldho Faruqi. "Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 14, no. 1 (2022): 20–30.
- Widyawati. "Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2, no. 2 (2021): 66.
- Wingarta, I Putu Sastra, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, and Reda Wicaksono. "PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA (The Influence of Identity Politics on

Indonesian Democracy).” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 4 (2021): 117–124.